

DAFTAR ISI

COVER DISERTASI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UNGGAH MANDIRI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
<i>ABSTRACT</i>	xix
KATA PENGANTAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	43
1.3. Tujuan Penelitian.....	43
1.4. Manfaat Penelitian.....	44
1.5. Keaslian Penelitian.....	46
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	50
2.1. LANDASAN TEORI	50
2.1.1. Keadilan Bermartabat.....	50
2.1.2. Teori Tentang Perjanjian.....	62
2.1.2.1. Asas Kebebasan Berkontrak.....	63
2.1.2.2. Asas Konsensualisme	65

2.1.2.3.	Asas Iktikad Baik.....	66
2.1.2.4.	Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> (Asas Kepastian Hukum)	67
2.1.2.5.	Asas Kesetaraan	67
2.1.3.	Teori Hukum Pembangunan	68
2.2.	LANDASAN KONSEPTUAL.....	71
2.2.1.	Konsep Bisnis Finansial Teknologi LPBBTI Dan Para Pihak Dalam LPBBTI	71
2.2.2.	Konsep Pengaturan Hukum Untuk Perlindungan Para Pihak.....	81
2.2.3.	Konsep Penegakan Hukum Pada Penyelenggaraan LPBBTI	82
2.2.4.	Konsep Perlindungan Hukum Pada Penyelenggaraan LPBBTI	82
2.2.5.	Bekerjanya Hukum Oleh William Chambliss dan Robert B. Seidman....	84
2.2.6.	Konsep Penguatan Peraturan LPBBTI Melalui Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	86
BAB III METODE PENELITIAN		90
3.1.	Bentuk Dan Pendekatan Penelitian.....	90
3.1.1.	Bentuk Penelitian	91
3.1.2.	Pendekatan Penelitian	94
3.2.	Bahan Hukum	98
3.3.	Teknik Pengumpulan/Cara Perolehan Data	101
3.4.	Jenis Data.....	103
3.5.	Pengolahan Dan Analisis Data.....	104
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....		109
4.1.	Pengaturan Finansial Teknologi dalam LPBBTI Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak LPBBTI (<i>Ius Constitutum</i>)	109
4.1.1.	Karakteristik Finansial Teknologi LPBBTI.....	109
4.1.2.	Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan LPBBTI	114

4.1.3.	Tugas, Fungsi dan Kewenangan OJK.....	116
4.1.4.	Harmonisasi Pengaturan LPBBTI dalam UU ITE <i>junto</i> PP PSTE	118
4.1.5.	Harmonisasi Pengaturan LPBBTI dalam UU PPSK	122
4.1.6.	Harmonisasi Pengaturan Pelindungan Data Pribadi LPBBTI Dalam UU ITE, UU PDP, PP PSTE, dan POJK LPBBTI.....	140
4.1.7.	Pengaturan LPBBTI dan Kewajiban Penyelenggara Mematuhi POJK LPBBTI	157
4.1.8.	Asas-asas Perjanjian Dalam Penggunaan Kontrak Elektronik Penyelenggaraan LPBBTI	172
4.1.9.	Perbandingan <i>European Union General Data Protection (GDPR)</i>	185
4.1.10.	Perbandingan Pengaturan Dengan Inggris.....	191
4.1.11.	Perbandingan Pengaturan Antara Indonesia Dengan Jerman	198
4.1.12.	Perbandingan Dengan Pengaturan di <i>European Parliament</i>	201
4.1.13.	Perbandingan Pengaturan Dengan Tiongkok.....	208
4.2.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan LPBBTI (<i>Ius Operatum</i>)	213
4.2.1.	Perbedaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada LPBBTI, Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank.....	214
4.2.3.	Motif dan Alasan Menggunakan LPBBTI	242
4.2.4.	Daftar Penyelenggara LPBBTI Berizin di OJK per 9 Maret 2023	257
4.2.5.	Daftar Penyelenggara LPBBTI Ilegal Hingga April 2022	274
4.2.6.	Hak Penerima Dana Layanan Penyelenggara LPBBTI Yang Legal	286
4.2.7.	Kewajiban Penerima Dana Layanan Penyelenggara LPBBTI Yang Legal...290	
4.2.8.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemberi Dana dan Penyelenggara LPBBTI	295
4.2.9.	Kewajiban Pemberi Dana dan Penyelenggara LPBBTI	305
4.2.9.1.	Kewajiban Penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen LPBBTI	308
4.2.9.2.	Kewajiban Keterbukaan Informasi Produk dan Layanan.....	309

4.2.9.3. Kewajiban Pengelolaan Data dan Informasi, Dan Pengamanan Sistem Elektronik Oleh Penyelenggara LPBBTI	310
4.2.9.4. Kewajiban Penyelenggara LPBBTI Dalam Penerapan Manajemen Risiko ..	315
4.2.9.5. Kewajiban Penggunaan <i>Escrow Account</i> , <i>Virtual Account</i> , Rekening Dana, dan Media Pengalihan Dana Lainnya	317
4.2.9.6. Kewajiban Pelindungan Pertukaran Data Untuk Peningkatan Kualitas LPBBTI	318
4.2.10. Pelindungan Hukum Peminjam pada LPBBTI Terhadap Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Baku	321
4.2.11. Pelindungan Hukum Bagi Peminjam, dan Masyarakat	328
4.2.12. Pelindungan Hukum Preventif Melalui Koordinasi Pengawasan ITSK Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan	332
4.2.13. Penegakan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penyelenggaraan LPBBTI Berlandaskan Keadilan Bermartabat	335
4.2.13.1. Penegakan Hukum Dengan Instrumen Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Luar Pengadilan	350
4.2.13.2. Penegakan Hukum Dengan Instrumen Hukum Administrasi Dengan Penjatuhan Sanksi Administratif	353
4.2.13.3. Penegakan Hukum Melalui Instrumen Hukum Perdata	367
4.2.13.4. Penegakan Hukum Melalui Instrumen Hukum Pidana	370
4.3. Penguatan Peraturan Tentang Penyelenggaraan LPBBTI Yang Ideal Berdasarkan Keadilan Bermartabat (<i>Ius Constituendum</i>)	375
4.3.1. Penguatan POJK LPBBTI Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan LPBBTI	378
4.3.2. Penguatan POJK LPBBTI Terhadap Proses Penagihan Yang Memartabatkan Peminjam	383
4.3.3. Kepastian Hukum Terhadap Penyelenggara LPBBTI Untuk Mengikuti Asuransi	391
4.3.4. Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Bunga Keterlambatan	394

4.3.5. Harmonisasi POJK LPBBTI dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.....	397
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	422
5.1. Kesimpulan.....	422
5.1.1. Kelemahan Penggunaan Finansial Teknologi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak LPBBTI.....	422
5.1.2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Yang Tidak Efektif Bagi Para Pihak Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan LPBBTI.....	423
5.1.3. Kebutuhan Penguatan Peraturan Tentang Penyelenggaraan LPBBTI Yang Berkepastian Hukum Dan Bernilai Keadilan Bermartabat.....	425
5.2. Saran.....	426
DAFTAR PUSTAKA.....	431
LAMPIRAN I.....	467
LAMPIRAN II.....	475
LAMPIRAN III.....	486
LAMPIRAN IV.....	492
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	492

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
5C	<i>Character, capacity, capital, condition, and collateral</i>
AAUI	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
AFPI	Asosiasi <i>Fintech</i> Pendanaan Bersama Indonesia
AJB	Akta Jual Beli
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPKB	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
<i>CAMILAN</i>	<i>Camera, Microphone, Location</i>
<i>DFTJ</i>	Dewan Finansial Teknologi Jerman
<i>DLT</i>	<i>Distributed Ledger Technology</i>
DPS	Dewan Pengawas Syariah
E-KTP	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
<i>FCA</i>	<i>The Financial Conduct Authority</i>
<i>FCHA</i>	<i>Financial Conduct Authority Handbook</i>
<i>FSB</i>	<i>Financial Stability Board</i>
<i>FSMA 2000</i>	<i>Financial Services and Markets Act 2000</i>
<i>GDPR</i>	<i>European Union General Data Protection</i>
IDI	Informasi Debitur Individual
IKD	Inovasi Keuangan Digital
ITSK	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
K3	Kredit Kepemilikan Kendaraan
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KITAS	Kartu Izin Tinggal Terbatas
KK	Kartu Keluarga
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KPM	Kredit Pemilikan Mobil
KPR	Kredit Pemilikan Rumah

KPR	Kredit Kepemilikan Rumah
KPRS	Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi
KSM	Kredit Serbaguna Mandiri
KTJ	Kredit Tanpa Jaminan
Kuh. Perdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUHP (UU 1/1946)	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHP (UU 1/2023)	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2023
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LBH Jakarta	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
LKNB	Lembaga Keuangan Non-Bank
LPBBTI	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
NA RUU PPSK	Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
NBW	<i>Nieuw Burgerlijk Wetbook</i>
NIK	Nomor Induk Kependudukan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PBB	Pajak Bumi Bangunan
PBI 19/2017	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POJK 02/2018	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
POJK IKD	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

POJK LPBBTI	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
POJK LPMUBTI	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
POJK PPID SLIK	POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
POJK Usaha Pergadaian	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian
PP PSTE	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
PPh	Pajak Penghasilan
PRK	Pinjaman Rekening Koran
PTA	Pinjaman Tetap Angsuran
SE OJK LPBBTI	Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
SBG	Surat Bukti Gadai
SBUM	Subsidi Bantuan Uang Muka
SEOJK PPID SLIK	SEOJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
SITU	(Surat Izin Tempat Usaha
SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan
SLIK	Sistem Layanan Informasi Keuangan

SPT	Surat Pemberitahuan
SWI	Satuan Tugas Waspada Investasi
SWI	Satuan Tugas Waspada Investasi
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UU 13/2022	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
UU Adminduk	Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013
UU Cipta Kerja	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU HAM	Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU ITE	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
UU OJK	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
UU Perasuransian	Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
UU Perbankan	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UU Perlindos	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU PPSK	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UUD 1945	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WNI	Warga Negara Indonesia



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penyelenggara Terdaftar, Pemberi Pinjaman, Pinjaman Tersalurkan dari 2017-2021 (Sumber: OJK).....	7
Tabel 2 Penguatan Pasal 6 UU OJK Oleh UU PPSK (Sumber Tabel: Disusun Secara Pribadi).....	117
Tabel 3 Isi Dokumen Elektronik Perjanjian Pada Penyelenggaraan LPBBTI (Sumber: Diolah Secara Pribadi).....	165
Tabel 4 Dokumen Yang Diperlukan Untuk KPR Pada Bank Mandiri (sumber: diolah secara pribadi).....	223
Tabel 5 Besaran Minimum dan Maksimum Pinjaman Pada Bank Mandiri (sumber: diolah secara pribadi).....	226
Tabel 6 Besaran Suku Bunga KPR Multiguna Pada Bank Mandiri (sumber: diolah secara pribadi).....	227
Tabel 7 Dokumen Permohonan Kredit Pada Nobu Bank (sumber: <i>Nobu Bank</i>).....	230
Tabel 8 Uang Pinjaman Gadai Non-Emas Pada PT Pegadaian (Persero) (sumber: PT Pegadaian (Persero)).....	236
Tabel 9 Tarif Angsuran Bulanan Pinjaman Serbaguna Pada PT Pegadaian (Persero) (sumber: PT Pegadaian (Persero))	239
Tabel 10 Penyelenggara LPBBTI Desember 2021 (Sumber: OJK, Januari 2022).....	242
Tabel 11 Jumlah Penyaluran Pinjaman (Dalam Miliar Rp) Desember 2021 Sumber: OJK, Januari 2022	243
Tabel 12 Dana Yang Diberikan oleh Pemberi Pinjaman Berdasarkan Lokasi (Sumber: OJK, Januari 2022).....	246
Tabel 13 Jumlah Penyaluran Pinjaman Kepada Sektor Produktif Per Desember 2021 (Sumber: OJK, Januari 2022)	248
Tabel 14 Perbedaan Penyelenggara LPBBTI Ilegal dan Legal (sumber: diolah secara pribadi).....	255
Tabel 15 Daftar Penyelenggara LPBBTI Berizin di OJK per 9 Maret 2023 (sumber: OJK, 15 Maret 2023).....	257
Tabel 16 Daftar Penyelenggara LPBBTI Ilegal Per April 2022 (Sumber: SWI OJK Tahun 2022)	275
Tabel 17. Kualitas Pembayaran pada LPBBTI Periode Desember 2021 (sumber: OJK, Januari 2022)	291

Tabel 18. Pinjaman Tidak Lancar Dalam 30-90 Hari Periode Nov-Des 2021 (sumber: OJK, Januari 2022).....292

Tabel 19. Pinjaman Perseorangan Tidak Lancar Berdasar Gender dan Kelompok Umur Selama 30-90 Hari Periode Desember 2021 (sumber: OJK, Januari 2022)292

Tabel 20. Pinjaman Perseorangan Macet Lebih Dari 90 Hari Berdasar Gender dan Kelompok Umur Periode November Desember 2021 (sumber: OJK, Januari 2022)293

Tabel 21. Data Yang Identifikasi Pada Perseorangan dan Korporasi (Sumber: Diolah Secara Pribadi).....311

Tabel 22. Tingkat TKB90 Per Mei 2023 (sumber tabel: tabel diolah secara pribadi).....392



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Para Pihak Dalam Penyelenggaraan LPBBTI (Sumber: Diolah Secara Pribadi) ...	15
Gambar 2 Isu Hukum Antara Penerima Dana LPBBTI Dengan OJK (Grafik: Diolah Secara Pribadi).....	27
Gambar 3 Isu Hukum Antara Penerima Dana Dengan Penyelenggara LPBBTI (Gambar: Diolah Secara Pribadi).....	35
Gambar 4 Para Pihak dan Hubungan Hukum Dalam Penyelenggaraan LPBBTI. (Sumber: Disusun Pribadi).....	78
Gambar 5. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. (Sumber: Disusun Secara Pribadi).....	399
Gambar 6. Diagram Bekerjanya Hukum Menurut Chambliss dan Seidman (Sumber: Adi Sulistiyono, Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia. 2006).....	408

